

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Hasil Transkrip Wawancara.

A. Pedoman Wawancara dan Hasil Transkrip Wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Nama : Bapak Ir. Robi Ampera selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2014.

1. Bagaimana pendapat anda tentang berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: Menurut saya, Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal tidak sesuai dengan semangat pelayanan terpadu satu pintu mbak. Kemudian Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo digabung menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013. Menurut saya idealnya digabung menjadi BPMPT Kabupaten Kulon Progo agar dalam memberikan pelayanan publik bidang perizinan investasi bisa secara optimal dan lebih efektif dalam melakukan koordinasi lintas sektoral.

2. Bagaimana penanaman modal yang dilakukan investor di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun? Apakah meningkat atau menurun?

Jawaban: Terjadi peningkatan penanaman modal mbak, karena ada beberapa peraturan perundangan tentang kawasan industri, terkait

dengan mega plan pelabuhan, perikanan, bandara, penambangan pasir besi menarik datangnya investor ke Kulon Progo.

3. Apa sajakah yang sering dikeluhkan para investor ketika akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: Biasanya yang dikeluhkan para investor adalah tentang lahan investasi, daya dukung sarana dan prasarana investasi di Kabupaten Kulon Progo.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Penggabungan Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo menjadi BPMPT Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu upayanya. Karena BPMPT Kabupaten Kulon Progo dipandang mampu melaksanakan pelayanan publik bidang perizinan investasi dan menuju pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan adanya BPMPT Kabupaten Kulon Progo, terjadi penyederhanaan perizinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian. Para petugas teknis lapangan bertanggung jawab kepada pengelola PTSP, dan tidak lagi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu. Hal ini penting, karena menyangkut transparansi, kecepatan dan kemudahan layanan perizinan investasi.

5. Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Ya belum adanya regulasi di bidang perizinan investasi, di antaranya belum adanya acuan hukum sebagai landasan operasional di bidang investasi dalam bentuk Peraturan Daerah, aturan-aturan/ kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kemudahan, fasilitasi investasi dan jaminan kepastian berusaha dan aturan-aturan yang sifatnya teknis operasional pelaksanaan penanaman modal di daerah. Sedangkan investor memerlukan regulasi yang pasti untuk menanamkan modalnya.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Tentang masalah regulasi, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal dan mengenai masalah lahan maka BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi tentang mega proyek kepada masyarakat yang akan terkena dampaknya, menambah sarana dan prasarana investasi.

B. Pedoman Wawancara dan Hasil Transkrip Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Nama : Ibu Nuryani selaku Kepala Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi BPMPT Kabupaten Kulon Progo didampingi stafnya Bapak Dorijatun Kuncoroyakti.

Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2014.

1. Bagaimana pendapat anda tentang berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: Dengan adanya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo lebih memudahkan untuk berkoordinasi dengan sektor lain dan mengarah ke pelayanan terpadu satu pintu yang lebih memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo.

2. Apa saja upaya yang dilakukan BPMPT Kabupaten Kulon Progo bidang kerja sama dan promosi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: upaya yang kami lakukan selaku bidang kerja sama dan promosi BPMPT Kabupaten Kulon Progo yaitu Program BPMPT Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan promosi dan kerjasama investasi di antaranya dengan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah,

pengembangan potensi unggulan daerah, fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT), koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Penanaman Modal, penyelenggaraan pameran investasi, penyusunan data dan informasi Penanaman Modal, dan pengembangan sistem informasi penanaman Modal.

3. Apa saja kendala yang dihadapi BPMPT Kabupaten Kulon Progo bidang kerja sama dan promosi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Kendalanya adalah anggaran mbk, anggaran kami paling kecil apabila dibandingkan anggaran kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Apa sajakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: dengan adanya BPMPT Kabupaten Kulon Progo merupakan upaya yang dilakukakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi.

5. Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: belum adanya regulasi yang mengatur perizinan investasi, dan terbatasnya fasilitas promosi maupun materi promosi dan terbatasnya data dan informasi investasi. Untuk dapat meningkatkan promosi diperlukan media promosi dan materi promosi yang di dukung dengan data yang riil, akurat, up-to date dengan dukungan Studi Kelayakan, Detail Enginerring Data (DED), yang didasari dengan kajian-kajian secara ekonomis. Di samping dukungan sarana prasarana wilayah/infratraktur yang memadahi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, menambah fasilitas promosi maupun materi promosi serta data dan

informasi investasi agar menarik investor dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi investasi.

C. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Nama : Hanif Indra Perdana selaku staf Bidang Fasilitasi dan Pengembangan BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Wawancara dilakukan tanggal 5 Februari 2014.

1. Bagaimana pendapat anda tentang berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: BPMPT menjadi upaya melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di Kulon Progo, karena kewenangan badan lebih kuat.

2. Apa sajakah pengembangan yang perlu dilakukan BPMPT Kabupaten Kulon Progo untuk mendatangkan investor?

Jawaban: peningkatan iklim investasi melalui peningkatan sarana dan prasarana investasi, adanya kawasan industri, perizinan terpadu satu pintu yang sesuai regulasi.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Koordinasi yang dilakukan BPMPT Kabupaten Kulon Progo lebih optimal dan tidak adanya pungutan liar dalam pengurusan perizinan investasi.

4. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: kendalanya masih ada beberapa izin yang di instansi teknis seperti izin kios dilimpahkan ke UPTD Pasar (Disperindag dan ESDM Kabupaten). Kendala lainnya seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur perizinan investasi di daerah.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Adanya koordinasi kebijakan dan Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal.

6. Apa harapan anda ke depan tentang fasilitas yang ada di BPMPT Kabupaten Kulon Progo untuk pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: adanya gedung BPMPT Kabupaten Kulon Progo yang terpadu atau berada dalam 1 unit agar pelayanan publik yang diberikan lebih terpadu.

D. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sub Perizinan BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Nama : Bapak Juniardi T. selaku kepala bidang pelayanan dan pengaduan, didampingi Bapak Susilo selaku kepala sub bidang perizinan BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

Wawancara dilakukan tanggal 12 Februari 2014.

1. Bagaimana pendapat anda tentang berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: ketika dulu kantornya terpisah koordinasinya sulit. Dari kantor menjadi badan kedudukannya sama dengan dinas lain dan memudahkan koordinasi.

2. Bagaimana perbandingan pelayanan publik bidang perizinan investasi sebelum dan sesudah ada pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: Kalau dulu KPM menangani penanaman modal dan KPT menangani perizinannya. Dengan adanya penggabungan menjadi BPMPT memudahkan pelayanan publik bidang perizinan investasi.

3. Bagaimanakah menurut anda jumlah masyarakat yang melakukan perizinan investasi dari tahun ke tahun di BPMPT Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: meningkat

4. Apa kelebihan pelayanan yang diberikan setelah menjadi BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam perizinan investasi?

Jawaban: Kita bisa mengakses SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Penerapan SPIPISE didahului dengan pemberian Hak Akses SPIPISE dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. SPIPISE merupakan sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan (untuk Kulon Progo adalah BPMPT), sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPT langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah. Layanan Perizinan secara Online ini merupakan bagian dari *National Single Window for Investment* (NSWI) yang memungkinkan pemohon izin dapat melakukan *tracking* terhadap proses perizinan yang diajukan. Selain itu SPIPISE juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Perpajakan dan Bea Cukai, serta Badan Pusat Statistik melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

5. Bagaimana upaya yang akan dilakukan apabila ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan perizinan investasi di BPMPT Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: asas penyelesaian pengaduan adalah cepat dan tuntas. Masyarakat dapat mengadu di BPMPT Jl. Perwakilan No. 2 Wates dan BPMPT Jl. KHA.Dahlan Wates Kulon Progo. Masyarakat yang ingin

mengadu dapat menggunakan sarana pengaduan melalui telepon 0274-774402, SMS (Short Message Service), website **Error! Hyperlink reference not valid.**, e-mail bpmpt.kulonprogo@go.id, dan kotak pengaduan yang terdapat di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilkannya. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: Pengangkatan Tenaga Harian Lepas ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang prima. Tenaga Harian Lepas ini ditempatkan sebagai front office yakni petugas penerima berkas permohonan perizinan dan menyerahkan sertifikat izin yang telah selesai diproses. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar pelayanan perizinan yang dilakukan di Unit II BPMPT, Jalan. KHA. Dahlan, Wates, Kulon Progo. Proses pengangkatan Tenaga Harian Lepas bersifat terbuka dan transparan. Hal ini ditunjukkan dengan pemasangan iklan lowongan penerimaan tenaga harian lepas melalui media. Selain itu mengirim pegawai untuk mengikuti diklat.

7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: 1 badan tapi masih di 2 tempat walaupun kerjanya berkoordinasi, belum adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan investasi di daerah, dan masih adanya pelayanan yang belum dilimpahkan ke BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?

Jawaban: pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan investasi.

E. Pedoman Wawancara dengan masyarakat pemohon perizinan investasi di BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

1. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan publik bidang perizinan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan publik bidang perizinan investasi di BPMPT Kabupaten Kulon Progo?

3. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan petugas BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan pelayanan publik bidang perizinan investasi?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan publik bidang perizinan investasi?
5. Bagaimana pendapat anda tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan publik bidang perizinan investasi?
6. Bagaimana pendapat anda tentang keramahan petugas dalam memberikan pelayanan publik bidang perizinan investasi?



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/155/1/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL** Nomor : **045/UN.34.14/PL/2013**
Tanggal : **9 JANUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **IKA KUSUMA YULIYANTI** NIP/NIM : **07401241029**
Alamat : **FAKULTAS ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN INVESTASI**
Lokasi :
Waktu : **9 JANUARI 2014 s/d 9 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **9 JANUARI 2014**
An Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmp.kulonprogokab.go.id Email : bpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00019/I/2014

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/1551/2014, Tanggal 9 Januari 2014, Perihal : Izin penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **IKA KUSUMA YULIYANTI**
NIM / NIP : **07401241029**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN INVESTASI**

Lokasi : **BPMPT KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **09 Januari 2014 s/d 09 April 2014**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **16 Januari 2014**

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala BPMPT Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

